

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018- 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra dan RKPD yang disusun untuk menjadi acuan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 tahun anggaran dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada akhir tahun 2019, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 14 Program dan 146 Kegiatan. Hasil evaluasi renja dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel T.C. 29

- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.30 (Terlampir)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selatan

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan secara berkesinambungan melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, bidang Pengendalian Penyakit, bidang Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak dan bidang Sumber Daya Kesehatan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel telah dilaksanakan 14 Program dan 146 Kegiatan dengan hasil evaluasi sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 124,91% dan rata-rata pencapaian Indikator Program sebesar 104,66%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan baik. Faktor keberhasilan ini didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh regulasi-regulasi di bidang pelayanan kesehatan, pengalokasian dana, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta adanya dukungan lintas sektor terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga serta sumber daya kesehatan, dilakukan koordinasi dan sinergisme program dan kegiatan dengan Kementerian Kesehatan RI serta Lintas Program dan Lintas Sektor terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain Direktorat Jenderal dan Unit Utama yang ada di Kementerian Kesehatan RI. Sinergisme dilakukan pada tahap perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan program/kegiatan serta tahap monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Namun demikian, koordinasi dan sinergisme antar lembaga/OPD ini masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Masih diperlukan upaya advokasi yang lebih intens dan proaktif oleh Perangkat Daerah yang bergerak di sektor kesehatan dalam rangka mendorong lintas sektor terkait berkontribusi aktif melaksanakan program-program pembangunan berwawasan kesehatan.

Pada sisi lain, masih ditemukan kendala teknis berupa pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan, kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta adanya beban ganda penyakit di masyarakat berupa meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi disertai meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular, bahkan saat ini kita sedang menghadapi Pandemi Global Covid-19 (Corona Virus Disease) yang banyak menelan korban jiwa di seluruh dunia termasuk negara Indonesia dan khususnya Provinsi Sulawesi Selatan.

Kolaborasi antar OPD dan lintas sektor terkait serta kendala teknis yang dihadapi, dapat menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi apabila upaya yang dilakukan hanya berfokus pada internal sektor kesehatan saja, sementara banyak sektor lain yang harus ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan sektornya masing-masing yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan sektor kesehatan, sehingga apabila kolaborasi tidak terjadi maka tentu akan memperlambat pencapaian visi-misi pembangunan, demikian pula akan mempengaruhi capaian program nasional dan internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) karena program-program dimaksud membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk mencapai target/goals yang telah ditetapkan di tingkat global.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, beberapa hal menjadi tantangan dan peluang antara lain :

- Periode Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang masih merupakan periode pemerintahan baru, sehingga menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Kesehatan dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan baru, mengevaluasi hasil pembangunan sebelumnya dan membuat grand design dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintahan daerah 5 (lima) tahun ke depan khususnya pembangunan sektor kesehatan dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.
- Era Revolusi Industri 4.0, era millenials yang menuntut profesionalisme petugas kesehatan dalam memanfaatkan teknologi canggih dan mengembangkan sistem yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan, serta mengembangkan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi
- Era pasar bebas, dimana sektor kesehatan dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, menawarkan jasa sektor pelayanan kesehatan kepada negara lain, membangun kerjasama sektor kesehatan, namun disisi lain sekaligus menjadi tantangan dengan maraknya persaingan sektor jasa pelayanan kesehatan dari negara lain masuk ke dalam negeri
- Adanya kesepakatan global seperti Sustainable Development Goals yang menuntut kerja keras dan kerja cerdas semua Organisasi Perangkat Daerah, pihak swasta/NGO/Instansi terkait lainnya dan seluruh lapisan masyarakat, untuk berkolaborasi menuntaskan permasalahan kesehatan yang dihadapi sesuai goals yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan meningkatkan kinerja birokrasi, menciptakan petugas/birokrat yang profesional, memberikan pelayanan birokrasi yang berkualitas tinggi dan memberi kepuasan kepada masyarakat

- Kesiapsiagaan terhadap kejadian global seperti Pandemi Covid -19, menjadi tantangan serius bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pencegahan dan penanggulangan pandemi/wabah penyakit dengan cepat dan tepat, agar tidak menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas diantaranya :

- Mencermati kondisi capaian awal program dan kegiatan sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- Merumuskan program dan kegiatan yang inovatif yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
- Mengutamakan kolaborasi dan integrasi antar program dan antar sektor terkait
- Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai output dan outcome yang direncanakan
- Fokus orientasi pada pemberian pelayanan terbaik dan kepuasan masyarakat

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP

Proses review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKP), dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKP dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan. Proses ini dilakukan untuk menjaminkesesuaian antara rancangan awal program dan kegiatan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

Berdasarkan review yang dilakukan, diketahui bahwa rancangan awal RKP sudah sejalan dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing Bidang/Pengelola Program. Tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKP. Hal ini dapat dilihat pada **tabel T-C.31** tentang Review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan(**Terlampir**).

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan proses perencanaan dan penganggaran juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan program dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Pada proses pengusulan program dan kegiatan tahun 2021, dilakukan Musrembang Provinsi secara elektronik (e-Musrembang, sebagai dampak Pandemi Covid-19), guna membahas usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Pembahasan dilakukan melalui desk elektronik antara Bappeda Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota pada dasarnya sudah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi, sebagian besar usulan tersebut telah terakomodir dalam usulan Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah Provinsi, dan terdapat beberapa usulan yang diakomodir. Kabupaten/Kota juga diarahkan untuk mengalokasikan kegiatan yang belum terakomodir di tingkat provinsi sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota menggunakan dana APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel T-C. 32 (Terlampir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 menetapkan Visi : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Mandiri : mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum

Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah

Makmur : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 : "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"

- Berpenghasilan Menengah Tinggi :
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktivitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
- Sejahtera
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
- Adil
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik

- Berkesinambungan
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Sementara pencapaian Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019

- On Track
 - Kematian Ibu
 - TFR
 - CPR semua cara
 - Kematian Bayi
 - Prevalensi TB
 - Prevalensi HIV
 - Eliminasi Malaria
 - Imunisasi Dasar Lengkap
 - Ketersediaan Obat Vaksin di Puskesmas
 - Obat yang memenuhi syarat
- Perlu Kerja Keras
 - *Stunting* pada anak bawah dua tahun (baduta)
 - Cakupan kepesertaan JKN/KIS
 - Akreditasi Puskesmas
 - Puskesmas dengan 5 Jenis tenaga kesehatan
- Sulit Tercapai
 - Tekanan Darah Tinggi
 - Obesitas
 - Perilaku Merokok

Indikator Pembangunan Kesehatan

- ❖ Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
 - Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
 - Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)
- ❖ Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
 - Prevalensi Stunting Balita (%)
 - Prevalensi Wasting Balita (%)
- ❖ Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
 - Insidensi TB (per 100.000 Penduduk)
 - Insidensi HIV (%)
 - Eliminasi Malaria (Kab/Kota)
 - Merokok Usia \leq 18 Tahun (%)
 - Obesitas Usia 18+ Tahun (%)
- ❖ Meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan dan Meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas
 - Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap (%)
 - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi (%)
 - RS Terakreditasi (%)
 - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
 - Puskesmas dengan Dokter sesuai standar (%)
 - Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)
 - Sediaan Farmasi memenuhi syarat (%)
 - Makanan memenuhi syarat (%)
- ❖ Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk
 - Cakupan Kepesertaan JKN (%)
 - Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Juta Jiwa)

Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sementara Strategi RPJMN 2020-2024 adalah :

- Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi
- Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
- Peningkatan Pengendalian Penyakit
- Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 telah sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan Tanggap Darurat Bidang Kesehatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Akses dan Layanan Kesehatan Masyarakat di Area Publik
4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang kesehatan tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sasaran pokok yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan

Indikator Kinerja	Target
Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Brigade Siaga Bencana (BSB)	100%

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target
Nilai SAKIP OPD	76%
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	98%
% ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%

3. Meningkatkan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Area Publik

Indikator Kinerja	Target
Cakupan Ketersediaan Kesehatan di Area Publik	100%

4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Setinggi-tingginya dalam rangka mencapai Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Indikator Kinerja	Target
Umur Harapan Hidup	70,30 Tahun

1.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam pembangunan sektor kesehatan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah memprioritaskan antara lain pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang kesehatan.

Visi Kepala Daerah adalah "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter" dimana diharapkan terwujud Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter". Sementara Misi yang dirumuskan terkait sektor Kesehatan adalah bagaimana mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif serta mewujudkan kualitas manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Fokus prioritas Sektor Kesehatan adalah meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), menurunkan Kematian Ibu dan Anak, meningkatkan Status Gizi Masyarakat khususnya penanggulangan Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting, pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta upaya preventif dan promotif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SDGs

Pencapaian SDGs sangat pula berpengaruh terhadap perumusan program dan kegiatan disebabkan terdapat beberapa indikator yang belum tercapai pada saat pelaksanaan MDGs dilanjutkan untuk dicapai melalui program SDGs antara lain menurunkan kematian Ibu dan Anak, penurunan prevalensi Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting, pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- Pencapaian NSPK dan SPM

Pencapaian SPM merupakan dasar utama penyusunan Program dan Kegiatan karena merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

SPM Provinsi berisi tentang Persentase Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan serta Persentase Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Pada sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi memiliki fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian SPM tingkat Kabupaten/Kota.

Dimana indikator SPM Kabupaten/Kota menekankan pada upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

- Prioritas Kementerian Kesehatan RI

Prioritas Kementerian Kesehatan RI menjadi standar bagi seluruh Provinsi untuk merumuskan program dan kegiatan, dimana arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta. Sementara indikator pembangunan kesehatan yang akan dicapai diantaranya meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak, meningkatnya Status Gizi Masyarakat, meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular, meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan dan meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas serta meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Jumlah program sebanyak 14 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 211 kegiatan
 - Lokasi program dan kegiatan tersebar di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kabupaten/Kota, meliputi Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan di tingkat masyarakat.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp. 178.891.281.263,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel **T-C.33** terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program yang merupakan penjabaran kebijakan, tujuan dan sasaran yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB)
2. Program Pembangunan Rumah Sakit Regional
3. Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4. Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
5. Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan RS
6. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9. Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
10. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Selain Program Prioritas, terdapat juga Program Rutin Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rancangan Akhir Renja Tahun 2021 memuat a). Indikator Kinerja Program/Kegiatan;b). Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan;c). Hasil Kegiatan d). Kebutuhan Dana/Pagu Indikatifserta e). Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022,dapat dilihat pada matriks terlampir.

Disamping itu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membuat pemetaan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini, memuat sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi seluruh bidang/seksi/sub bagian lingkup Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang pada akhirnya menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana kerja ini harus dijalankan secara bertanggung jawab, dilandasi komitmen dan dedikasi tinggi agar seluruh target yang ditetapkan dapat dipenuhi dan pada akhirnya akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Makassar, Mei 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

dr.H.MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, M.H.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660217 199803 1 004